

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi pada LKPD di Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan 2019)

Yudistira, Abdul Rohman¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local government characteristics on regional government transparency. The independent variables used in this research are the size of the government (SIZE), the quality of financial reports (OPINI), the level of government response (ACCRUAL), and the political environment (POLITICS). This study uses secondary data in the form of financial reports obtained from every official website of the provincial government in Indonesia. This research used purposive sampling method. The sample of this study consisted of 34 local governments in Indonesia for the 2018-2019 period. The analysis model uses logistic regression analysis. The results of this study indicate that the size of the local government (SIZE) and the political environment (POLITICS) have a positive effect on the transparency of local government. However, the Quality of Financial Statements (OPINI) and Response Level (ACCRUAL) negatively affect local government financial transparency.

Keywords: Transparency. Government size (SIZE), financial statements (OPINI), response rate (ACCRUAL), political environment (POLITICS).

PENDAHULUAN

Transparansi dalam pemerintahan merupakan masalah kritis dalam pemerintahan yang demokratis. Akuntabilitas kepada publik diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis guna meningkatkan keterbukaan dalam keterbukaan data anggaran. Kenaikan dari keterbukaan pemerintah sangat dibutuhkan dalam lembaga guna pemeriksaan, penangkalan tindak korupsi serta penyelewengan sumber energi publik yang berujung pada kendala. Pemerintahan daerah merupakan pihak yang diamanatkan bakal mengelola dana dari pihak masyarakat, maka berhasil tidaknya pengelolaan bujet sangat bergantung kepada instansi pemerintahan daerah yang melaksanakannya (Adisasmita, 2011). Penggunaan bujet dilakukan melewati pembentukan laporan keuangan selaku bentuk dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas didefinisikan sebagai respon pemerintah kepada publik tentang tingkat kinerjanya (Pina et al., 2010)

Korupsi permasalahan utama dari pengelolaan keuangan di suatu negara. Menurut Lembaga Transparency International (TI) mengeluarkan informasi bahwa indikator pemahaman korupsi (Corruption Perception Index) selama tahun 2020. Indonesia menduduki peringkat ke-102 pada 180 negara dengan skor CPI sebesar 37. Skor CPI berada pada rentang 0-100, 0 berarti negara tersebut diartikan sebagai negara yang sangat korup, sementara untuk skor 100 berarti negara tersebut diartikan jauh dari tindak korupsi. CPI mendeskripsikan arti dari korupsi atas pemalsuan dari kekuasaan untuk keperluan perorangan yang mencangkup sektor publik, administrasi pemerintahan dan politik.

Pada pemerintahan daerah di Indonesia, laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut. Menurut penjelasan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 01.9 terkait cara Penyusunan Laporan Keuangan dapat diketahui bahwa tujuan khusus dari penyajian pelaporan keuangan pemerintahan daerah adalah untuk melaporkan dan menyajikan data terkait pengelolaan keuangan yang merupakan dasar untuk pengambilan keputusan juga sebagai bukti akuntabilitas yang dimiliki pemerintahan daerah terhadap sumber daya keuangan yang pengelolaannya dipercayakan kepada entitas.

¹ Corresponding author

Sisi lain penggunaan sistem informasi keuangan daerah adalah untuk mendukung kebijakan dalam melakukan perumusan kebijakan fiskal nasional serta untuk memperjelas akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan desentralisasi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2005 (Republik Indonesia, 2005b). Penyajian laporan terkait informasi keuangan daerah harus diberikan melalui situs resmi pemerintahan daerah, tercantum pada pasal 13 (b) peraturan pemerintah tersebut. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik/Undang-Undang Nomor 14/2008 (Republik Indonesia, 2008) ditetapkan untuk mengatur tanggung jawab badan publik dalam menyebarluaskan informasi publik. Badan publik dalam hal ini termasuk pemerintahan daerah.

Adanya pemberlakuan peraturan tersebut, siapapun yang menjadi pemohon informasi publik akan dengan mudah mendapatkan informasi keuangan public tersebut secara mudah, cepat, efektif, efisien, serta memerlukan biaya yang cukup murah melalui jaringan internet (Rahman et al., 2013). Untuk menaikkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan, pemerintahan daerah dapat memanfaatkan media elektronik dalam menyampaikan dan menyebarluaskan laporan keuangannya (Pina et al., 2010). (Alan K. Styles, 2007) menyatakan bahwa pelaporan keuangan melalui internet adalah salah satu tempat yang murah tetapi efisien untuk pemerintahan daerah dalam menyampaikan informasi mengenai manajemen keuangan.

Kata *e-government* diciptakan sebagai hasil dari kemajuan teknis dalam bentuk internet, dan pemerintah mulai bereaksi terhadap perubahan ini. *E-government* adalah penggunaan aplikasi teknologi informasi oleh pemerintah untuk menyampaikan hal yang berbeda kepada banyak pihak, termasuk masyarakat umum, investor, kreditur, dan pihak lain yang tertarik dengan informasi pemerintah yang relevan. (Achmad Badjuri & Trihapsari, 2004). Menurut pendapat Bertot et al., (2010) peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu solusi dalam menghemat biaya untuk menghilangkan korupsi pemerintah serta mendukung meningkatkan transparansi penggunaan keuangan daerah. Website adalah alat untuk mendorong pengungkapan publik yang efisien dan mempengaruhi elemen komunikatif dari pelaporan keuangan. (Yustina Hiola, Rosidi & Mulawarman, 2013). Penggunaan internet memiliki beberapa keunggulan diantaranya informasi mengenai akuntansi secara elektronik bisa didapatkan kapanpun dan dimanapun (Xiao et al., 2005).

Penelitian mengenai tingkat transparansi pemerintahan daerah sudah banyak dilakukan. Penelitian yang di lakukan oleh Alwahidi (2019) yang menghitung tingkat transparansi manajemen keuangan daerah berlandaskan dari *website*, interaksi antara kualitas transparansi keuangan berlandaskan *website* melalui kekayaan aset pemerintahan daerah, interaksi kualitas tingkat transparansi keuangan pemerintahan daerah berbasis *website* dengan pendapat BPK yang didapatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia mendapatkan hasil masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang beranggapan data keuangan dan informasi pengelolaan keuangan daerah adalah salah sesuatu yang bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan kepada publik. Sejalan dengan Muhammad Rizki Alwahidi (2019) penelitian yang dilakukan oleh Lucia Julisa Prihatian dan Irwan Taufiq (2016) menyatakan bahwa pada tahun 2015 ataupun 2016 data dari informasi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan yang di publikasikan masuk dalam kategori tidak cukup.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Hubungan terbentuk ketika satu pihak mendelegasikan kekuasaan serta tanggung jawab terhadap pihak lain untuk menyelesaikan tugas. Teori keagenan didasarkan pada gagasan bahwa pemilik dan manajer perusahaan mempunyai tujuan yang berlawanan (Jensen & Meckling, 1976). Adapun yang dimaksud pelaku pada penelitian ini adalah pemerintahan yang memerintah pada suatu wilayah (kabupaten/kota) tertentu, dengan pelaku utama adalah golongan. Agen (pemerintahan daerah) yang disebut perwakilan prinsipal (masyarakat) adalah agen yang diberikan kepercayaan guna memutuskan kepentingan yang terbaik masyarakat. Sebaliknya, kelompok yang tidak bisa memantau semua perbuatan atau keputusan yang dirancang oleh pemerintah kota, yang dapat mengarah pada agen yang ingin mengambil keputusan di satu sisi dan hanya mendukung kesejahteraan agen dengan mengorbankan kepentingan dan kepentingan komunitas.

Teori *principal-agent (agency)*, yang telah umum digunakan di administrasi publik guna menganalisis persoalan yang berkaitan dengan manajemen serta administrasi di suatu negara berdasarkan konsep desentralisasi, secara tradisional digunakan untuk memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Thompson, 1998). Ketersediaan informasi yang diungkapkan oleh agen, di sisi lain, terkait erat dengan kasus yang terjadi dalam hubungan *principal-agent* (Alvarez & Hall, 2006). Akibatnya, upaya telah dilakukan untuk mengenali motivasi yang ada dalam pengungkapan sektor publik tertentu menggunakan teori *principal-agent* (Gang, 1998).

Pengetahuan yang tidak memiliki keseimbangan dari pemerintah selaku agen serta masyarakat selaku prinsipal akan diakibatkan oleh masalah keagenan. Menurut Mohamad et al. (2004) dan Mulyana (2006), transparansi muncul sebagai respon terhadap isu asimetri pengetahuan. Menurut teori asimetri informasi, ada ketidaksesuaian antara informasi dari manajemen, yang memiliki akses langsung ke informasi yang mereka miliki, dan informasi dari warga yang tidak berada di bawah kendali manajemen. Menurut Scott (1997), kompetensi keberlanjutan organisasi diukur dengan bagaimana organisasi menghasilkan pengetahuan yang dapat diakses, seimbang, serta terperinci untuk seluruh pihak yang memiliki kepentingan (pemangku kepentingan).

Pengaruh Ukuran Pemerintah (SIZE) terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintahan daerah merupakan faktor yang telah diperiksa secara ekstensif untuk menentukan jumlah pengungkapan yang diperlukan atau opsional. Menurut Serrano dkk. (2008), ada hubungan antara ukuran pemerintahan daerah dan berbagi informasi keuangan secara sukarela melalui internet (Serrano-Cinca et al., 2009). Sedangkan berdasarkan pendapat Piotrowski dan Bertelli (2010), ketersediaan sumber daya alam yang semakin lengkap untuk pelaksanaan pemerintahan daerah, semakin banyak uang yang diinvestasikan dalam sistem yang berupaya meningkatkan keterbukaan. Aset agregat yang dimiliki oleh pemerintah kota menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak uang.

H₁ : Ukuran pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap transparansi pemerintahan daerah di Indonesia

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan (OPINI) terhadap Transparansi Perintah Daerah

Transparansi dan kualitas informasi keuangan yang disediakan oleh pemerintah kota. Setelah informasi keuangan pemerintahan daerah disusun dan siap untuk diungkapkan kepada publik, lembaga audit keuangan harus melakukan audit untuk menentukan kewajaran informasi keuangan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah akan diberikan penghargaan dari pihak eksternal terkait penyajian pelaporan keuangan yang luar biasa, seperti yang dikemukakan oleh Styles dan Tennyson (2007) dan Pina et al (2010).

H₂ : Kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintahan daerah di Indonesia

Pengaruh Tingkat Respon (ACCRUAL) terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Terdapat dua teori yang bisa menjelaskan latar belakang dari pergantian standar akuntansi pemerintahan tersebut, ialah sudut pandang pasar yang bebas serta pro-regulasi (Deegan et al., 2000). Berhubungan dengan filosofi kelembagaan adalah bagaimana sebuah organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Wahyuni & Adam, 2012). Tujuan dari dibentuknya struktur dari sebuah organisasi merupakan untuk mendapatkan kesuksesan dengan mencapai sebuah keberhasilan dengan mendapatkan pengakuan (legitimasi) dari seluruh kegiatan organisasi yang sudah di coba untuk mendapatkan hasil yang efisien (Wahyuni & Adam, 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64/2013 (Republik Indonesia), semua pemerintahan daerah wajib menggunakan SAP berbasis akrual. Hal ini berdampak pada modifikasi deskripsi LKPD yang mencari legalitas dari pemerintah pusat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Adam (2016) didapati bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Kota Malang lebih bertumpu pada tekanan terhadap norma-norma yang ada di dalam perusahaan.

H₃ : Tingkat respon pemerintahan daerah terhadap regulasi berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintahan daerah di Indonesia.

Pengaruh Lingkungan Politik (POLITICS) terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Garcia dan Garcia (2010) beranggapan jika saingan politik akan lebih cepat memberikan informasi setiap penyampaian dalam aksi partai yang berdaulat yang tidak cocok dengan janji yang di ucapkan sepanjang pemilu berlangsung. Semakin kompetitif dari sebuah lingkungan politik, semakin banyak insentif yang dikeluarkan untuk mengkomunikasikan pada masyarakat (legitimasi) dari kinerja tata kelola yang baik lewat mengungkapkan data keuangan di situs pemerintahan daerah. Terlihat jelas bahwa legalitas lembaga legislatif akan secara sah melaksanakan fungsi legislasi, perhitungan serta pengawasan sejalan dengan peraturan dari perundang-undangan di bidang kinerja eksekutif di pemerintahan daerah.

Rahman dkk (2013) membuktikan jika kompetisi politik yang semakin tinggi akan mendesak pemerintahan daerah agar mengungkapkan informasi keuangannya di internet. Laswad dkk (2005), Sinaga (2011) dan Afriansyah dan Haryanto (2013) menerangkan kalau persaingan politik tidak memberi pengaruh pada tingkat pengungkapan data akuntansi secara sukarela lewat internet. Riset Trisnawati dan Achmad (2014) membagikan fakta empiris jika kompetisi politik menekan pemerintahan daerah untuk mengungkapkan informasi keuangan lewat situs web pemerintahan daerah masing-masing.

H₄ : Lingkungan politik di pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintahan daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Varibael Penelitian

Transparansi pemerintahan daerah didefinisikan sebagai keterbukaan informasi kepada publik oleh pemerintahan daerah dengan penyingkapan data keuangan dan non keuangan berlandaskan tingkat aksesibilitas situs web pemerintahan daerah oleh pengguna dapat diukur dengan menggunakan indikator yang ada pada penelitian Styles dan Tennyson (2007) yang kemudian telah disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah yang ada di Indonesia (Ratmono, 2013).

Adapun penghitungan skornya didasarkan pada :

- Poin 1 diberikan jika situs web pemerintahan daerah dengan mudah di temukan di halaman pertama pencarian di *Google search engine* dengan mencari nama pemerintahan daerah
- Tambah 1 poin jika data informasi keuangan dan non keuangan didapat setelah ≤ 3 klik pada mouse atau kurang pada situs web pemerintahan daerah
- Tambah 1 poin jika didapati ada data non keuangan dan data keuangan yang dapat diunduh dengan berbagai format
- Tambah 1 poin jika didapati informasi non keuangan dan informasi keuangan di situs web pemerintahan daerah.

Perolehan skor total tertinggi dalam penelitian ini adalah 4, sedangkan perolehan nilai terendah adalah 1. Jika total yang didapat sebanyak 4 poin akan mendapatkan nilai akhir 1 yang berarti transparan, jika mendapatkan dibawah 4 poin mendapatkan nilai akhir 0 yang berarti kurang transparan.

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini diantara lain ukuran pemerintah (SIZE), kualitas laporan keuangan (OPINI), tingkat respon (ACCRUAL), dan lingkungan politik (POLITICS).

Ukuran Pemerintah (SIZE)

Ukuran pemerintahan daerah adalah variabel yang digunakan untuk menilai sumber daya pemerintahan daerah. total aset pemerintahan daerah merupakan proksi untuk menilai ukuran pemerintahan daerah (2012). Logaritma natural (Ln) dari total aset juga digunakan oleh Rora (2010) sebagai pengganti variabel independen ukuran pemerintahan daerah.

$$SIZE = Ln \text{ TOTAL ASET}$$

Kualitas Laporan Keuangan (OPINI)

Pengajian Laporan keuangan yang berkualitas merupakan evaluasi atas penyusunan dan penyampaian LKPD berlandaskan kesimpulan dari audit BPK RI yang dikeluarkan dalam gambaran opini audit pemerintahan daerah. Opini audit itu sendiri merupakan indikator kualitas akuntabilitas

keuangan yang terlihat dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintahan daerah (LKPD). Opini audit terdiri dari beberapa tingkatan yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak memberikan pendapat (TMP), dan opini tidak wajar (TW). Skala yang digunakan dalam mengukur kualitas laporan keuangan yang berdasarkan penilai opini audit menggunakan skala dummy seperti dalam Trisnawati dan Achmad (2014).

skor 1 = WTP dan 0 = Non WTP

Tingkat Respon Pemerintah (ACCRUAL)

Tingkat respon pemerintahan daerah merupakan ketanggapan pemerintahan daerah terhadap pemberlakuan peraturan pemerintah pusat sebagai kewajiban dan konsekuensi publik. Dalam penelitian ini tingkat respon pemerintahan daerah dengan melihat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual pada situs pemerintah provinsi yang diukur berdasarkan Permendagri No. 64 / 2013 (Republik Indonesia, 2013) tentang ketentuan pasal 10 ayat (2) peralihan Pasal 2 ayat (2) bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintahan daerah paling lambat pada tahun anggaran 2015. **Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah variabel dummy dengan kategori :**

- Penerapan akrual basis SAP sebelum tahun anggaran 2015 = 1
- Implementasi akrual basis SAP pada tahun anggaran 2015 = 0

Lingkungan Politik (POLITICS)

Garcia (2010) beranggapan jika lawan politik bakal lebih cepat menyampaikan informasi setiap distorsi disegala aktivitas partai yang sedang berkuasa yang tidak sama dengan apa yang dikatakan pada saat pemilu berlangsung. Pada penelitian ini pengukuran lingkungan politik dilakukan untuk membuktikan pengaruh dari faktor lingkungan politik dimana lingkungan politik bisa memperkuat otoritas kinerja keuangan pemerintahan daerah serta ketaatan dari keterbukaan informasi keuangan pada website apabila kepala daerah memiliki partai pendukung minoritas (Yustina Hiola, Rosidi & Mulawarman, 2013). Mayoritas adalah posisi partai politik pendukung dari kepala daerah memegang kursi terbanyak pada DPRD Provinsi tersebut, minoritas adalah dimana partai pendukung kepala daerah memiliki jumlah kursi yang lebih sedikit di DPRD Provinsi dibandingkan dengan partai politik yang lain. **Pengukuran variabel menggunakan variabel dummy adalah sebagai berikut : 1 = minoritas dan 0 = mayoritas**

PENENTUAN SAMPEL

Populasi yang dipilih pada penelitian ini ialah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019, dengan jumlah 34 pemerintahan daerah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, di mana penentuan sampel tergantung pada ketersediaan informasi dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan untuk mengatasi kesulitan penelitian. Beberapa kriteria yang digunakan dalam melakukan pemilihan sampel penelitian ialah :

1. Pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki website resmi
2. Terdapat Laporan keuangan (LKPD) dapat diakses oleh para pengguna
3. Sudah di audit oleh BPK dan memiliki opini audit
4. Lingkungan politik dari komposisi anggota DPRD tahun 2014-2019

Metode Analisis

Analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik sebagai berikut

$$\text{Transparansi} = \alpha + \beta_1 \text{SIZE} + \beta_2 \text{OPINION} + \beta_3 \text{ACCRUAL} + \beta_4 \text{POLITICS} + e,$$

Transparansi : Transparansi Pemerintahan daerah
Size : Ukuran Pemerintahan daerah
Opini : Kualitas Laporan Keuangan
Accrual : Tingkat Respon Pemerintahan daerah
Politics : Lingkungan Politik Pemerintahan daerah

e : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi Indonesia yang memiliki situs resmi dan laporan keuangan (LKPD) yang dapat diakses oleh pengguna yang juga telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan memiliki opini audit, serta lingkungan politik komposisi anggota DPRD 2014-2019. Dengan mengumpulkan 34 provinsi selama dua tahun masa produksi, diputuskan sampel lengkap yang mengacu pada kebutuhan dan standar. Ada 64 sampel penelitian secara total. Berikut ini tabel ringkasan populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian :

Tabel 1
Ringkasan Populasi dan Sampel

No.	Kriteria dan Persyaratan	Jumlah
1	Pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki website resmi	34
2	Laporan keuangan (LKPD) dapat dengan mudah diakses oleh para pengguna dan tersedia dengan format SAP	(0)
3	Sudah di audit oleh BPK dan memiliki opini audit	(0)
4	Lingkungan politik dari komposisi anggota DPRD tahun 2014-2019	(0)
5	Total Provinsi yang menjadi objek penelitian	34
6	Total sampel (34x2)	68
7	Outlier data	(0)
	Total sampel	68

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari sampel. Tabel di bawah menunjukkan statistik deskriptif dari penelitian yang dilakukan.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	68	27.60	33.88	30.1200	104.717
OPINI	68	0	1	.99	.121
ACCRUAL	68	0	1	.12	.325
POLITICS	68	0	1	.68	.471
TRANSPARANSI	68	0	1	.62	.490
Valid N (Listwise)	68				

Sumber: Output SPSS data sekunder 2021, diolah.

Deskripsi Variabel

Variabel SIZE mempunyai value rata-rata sejumlah 30.1200, hal ini menunjukkan Pemerintah Provinsi di Indonesia menghasilkan value added sebesar 30.1200 untuk setiap total aset yang di miliki setiap provinsi. Nilai maksimum dan nilai minimum sebesar 33.88 dan 27.60.

Variabel kedua yaitu OPINI (kualitas laporan keuangan) memiliki mean sebesar 0.99 hal ini menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas keuangan dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah daerah sudah sangat baik. Sementara nilai maksimum dan minimum ditunjukkan masing-masing 1 dan 0. Nilai standar deviasi sebesar 0.121.

Variabel bebas ketiga yaitu ACCRUAL (tingkat respon pemerintah), miliki rata-rata sejumlah 0.12. Nilai maksimum dan minimum ACCRUAL ditunjukkan sebesar 1 dan 0. ACCRUAL memiliki value standar deviasi sebesar 0.325 yang menunjukkan lebih tinggi dari mean valuenya.

Variabel keempat yaitu POLITICS (Lingkungan Politik) memiliki mean sebesar 0.68. Nilai maksimum dan minimum 1 dan 0. POLITICS memiliki value standar deviasi sebesar 0.471. Berdasarkan data penelitian sebanyak 23 provinsi minoritas. Minoritas didefinisikan, partai pendukung kepala daerah memiliki jumlah kursi yang lebih sedikit di DPRD Provinsi dibandingkan dengan partai politik yang lain. Jumlah dari partai minoritas sebesar 67.6% dan mayoritas sebesar 32.4%.

Uji Kelayakan Model

1. Menilai -2 Log Likelihood

Tabel 3
Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	17.726	4	.001
	Block	17.726	4	.001
	Model	17.726	4	.001

Sumber: Output SPSS data sekunder 2021, diolah.

Nilai Chi Square Model Omnibus Test sebesar 17,726 dengan df sebesar 4 dan p value (sig.) sebesar 0,001 sehingga hasil ini signifikan atau dengan kata lain sudah memenuhi kriteria *goodness of fit test*.

2. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Tabel 4
Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	72.741 ^a	.229	.312

Sumber: Output SPSS data sekunder 2021, diolah.

Tabel 4 menunjukkan nilai statistik 0,312 dalam ringkasan model. Ini berarti bahwa variabel independen penelitian dapat mencapai 31,2% dari variabel dependen. Sisanya 68,8% dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model penelitian. Hal ini dikarenakan faktor lain yang mempengaruhi transparansi pemerintahan daerah tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Uji Hosmer dan Lemeshow

Tabel 5
Hosmer dan Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	11.555	8	.172

Sumber: Output SPSS data sekunder 2021, diolah

Nilai signifikansi penelitian ini adalah 0,172, seperti terlihat pada tabel 5. Berdasarkan temuan ini, dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa model dapat menjelaskan data empiris karena nilai *p-value(sig.)* melampaui 0,05. Dengan kata lain, model regresi logistik biner dianggap tepat karena cocok dengan data yang diamati.

4. Menilai Akurasi Model (Classification Table)

Tabel 6
Classification Table

Step	Observed	Percentage Correct
1	Overall	76.5%

Sumber: Output SPSS data sekunder 2021, diolah

Classification table digunakan untuk mengetahui efektif tidaknya model penelitian. Jika model yang sempurna *overall percentage* bernilai 100%. Tabel 6 memperlihatkan bahwa *overall percentage* yang memprediksi model dengan benar memiliki nilai cukup baik sebesar **76.5%**.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 7
Variables in The Equation

	B	S.E.	Sig.	Keterangan
Ukuran Pemerintah	.751	.341	.027	Diterima
Kualitas Laporan Keuangan	21.638	40.192.952	1.000	Ditolak
Tingkat Respon Pemerintah Daerah	.566	.907	.533	Ditolak
Lingkungan Politik	1.549	.593	.009	Diterima
Constant	-44.723	40.192.954	.999	

Sumber; Output SPSS data sekunder 2021

Berdasarkan perolehan analisis tabel diatas SIZE memiliki hubungan yang signifikan terhadap transparansi. Variabel SIZE memiliki nilai signifikansi 0.027. Sebagaimana dikarenakan nilai signifikansinya lebih rendah dari 0,05. Kondisi ini menyiratkan bahwa pemerintah yang memiliki ukuran yang lebih besar biasanya di berikan keharusan untuk lebih transparan lagi dalam pelaporan keuangannya. Pemerintah daerah yang besar biasanya pengelolaan keuangannya lebih rumit dan biasanya mendapatkan pengawasan yang lebih besar oleh karena itu pemerintah daerah yang mempunyai ukuran pemerintah yang lebih besar laporan keuangannya harus lebih lengkap dan lebih menjabarkan semua mengenai informasi keuangannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Tabel hasil regresi memperlihatkan bahwa OPINI mempunyai tingkat signifikansi sejumlah 1,000. Nilai signifikansinya lebih tinggi dari 0,05. Maka kondisi ini menunjukkan OPINI tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan transparansi pemerintah. Masing-masing pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak bisa memberikan jaminan jika pemerintah daerah tersebut melaporkan atau melampirkan laporan keuangannya secara transparan kepada masyarakat, karena ada beberapa pemerintah daerah yang sulit untuk didapatkan laporan keuangannya di situs pemerintah daerah tersebut. Trisnawati dan Achmad (2013) mengatakan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit selain WTP tidak berarti tingkat pelaporan keuangan pemerintah daerah tersebut lebih buruk dibandingkan dengan pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit WTP.

Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia mendapatkan nilai yang baik untuk kualitas laporan keuangan, namun untuk mengakses laporan keuangan tersebut masih dikatakan kurang begitu baik. Oleh sebab itu, walaupun pemerintah daerah memperoleh opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan tingkat aksesibilitas masyarakat yang bisa mengakses laporan keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

Hipotesis ketiga yang di tunjukan pada tabel diatas memperlihatkan bahwa ACCRUAL mempunyai nilai tingkat signifikansi sebesar 0,533. Hipotesis ketiga yakni dapat dikatakan bahwa ACCRUAL tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap transparansi pemerintah, dikarenakan nilai signifikansi ACCRUAL lebih tinggi dari kriteria signifikansi yakni 0,05. Terdapatnya regulasi bisa memberikan dampak lain yaitu penerapan dari berbagai macam regulasi di organisasi yang bersifat hanya formalitas hanya untuk mendapatkan pembenaran bahwa pemerintah daerah sudah mengikuti aturan yang berlaku atau yang diperintahkan. Seluruh pemerintah daerah diharuskan untuk mengikuti seluruh regulasi dan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan regulasi seperti di haruskan/bersifat memaksa setiap

pemerintah daerah untuk mematuhi dan menjalankan regulasi tersebut. Pada pemerintah daerah akuntabilitas masih belum Nampak terlihat dikarenakan regulasi hanya di jalankan untuk kepentingan formal saja. Menurut Nurkhamid (2008) pelaporan dari akuntabilitas yang di laporkan pemerintah daerah dilakukan karena itu merupakan sebuah kewajiban masing-masing pemerintah daerah yang masih bisa dibbilang semu. Hal ini juga bisa dilihat dari hasil penelitian rata-rata sampel pada tabel 7 bahwa penerapan regulasi mendapatkan nilai paling rendah hanya sebesar 0.121. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

Pada hipotesis keempat yang ditunjukkan pada tabel diatas memperlihatkan bahwa POLITICS mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,009. Hipotesis keempat yakni dapat dikatakan bahwa POLITICS memiliki hubungan yang signifikan terhadap transparansi pemerintah, dikarenakan nilai signifikansi POLITICS lebih rendah dari kriteria nilai signifikansi yakni 0,05. Pelaporan keuangan di website pemerintah daerah biasanya di pengaruhi oleh kompetisi politik yang tinggi di daerah tersebut, pemerintah daerah juga harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk pengawasan. Pemerintah daerah biasanya akan berusaha sebaik mungkin dalam pelaporan keuangan agar saingan politik dari pemimpin kepada daerah tersbut bisa mengurangi pengawasan dari saingan politiknya. Jika dalam pelaporan keuangannya terlihat baik kepala daerahnya mendapatkan nilai positif dari masyarakat dan biasanya mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih kembali di pemilu berikutnya jika dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakn untuk mengkaji pengaruh dari karakteristik pemerintah daerah SIZE, OPINI, ACCRUAL dan POLITICS terhadap transparansi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang di peroleh dari setiap situs resmi pemerintah daerah provinsi di Indonesia Data tersebut meliputi informasi keuangan pemerintah daerah dan lingkungan politik yang diperoleh dari situs resmi pemerintah daerah (provinsi). Selain itu disertakan dengan data kualitas Laporan Keuangan Website Pemerintah Daerah dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI. Data lingkungan politik daerah dan anggota DPRD dari sumber resmi situs pemerintah daerah (provinsi). Sampel penelitian ini terdiri dari 34 pemerintah daerah di Indonesia periode 2018-2019.

Model analisis menggunakan analisis regresi logistic. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah (*SIZE*) dan Lingkungan Politik (*POLITICS*) berpengaruh secara positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Namun, Kualitas Laporan Keuangan (*OPINI*) dan Tingkat Respon (*ACCRUAL*) berpengaruh secara negatif terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah.. Dalam penelitian mengenai transparansi pemerintah daerah masih memilikiketerbatasan Didapatkan beberapa provinsi yang laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) susah didapatkan harus melewati ≥ 3 klik di situs web pemerintahan daerah, ada beberapa provinsi laporan keuangan pemerintahan daerah terpisah-pisah tidak dalam satu file, terdapat beberapa provinsi yang laporan keuangannya tidak dapat di download jadi harus melalui tangkapan layar, hanya mengamati kesiapan informasi keuangan di situs pemerintah provinsi saja. Berdasarkan keterbatasan tersebut peneliti selanjutnya diharapkan agaer mengembangkan dan menambah variabel baru seperti rasio kemandirian pemerintahan daerah, rasio pembayaran hutang, pendapatan perkapita, jumlah penduduk, serta menambah jumlah tahun penelitian sehingga dapat menilai konsistensi hasil studi.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Achmad Badjuri, & Trihapsari, E. (2004). *Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah*.
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138.
- Alan K. Styles, M. T. (2007). THE ACCESSIBILITY OF FINANCIAL REPORTING OF U.S. MUNICIPALITIES ON THE INTERNET. *Journal of Public Budgeting*, 19(1), 56–92.
- Alvarez, R. M., & Hall, T. E. (2006). Controlling democracy: The principal-agent problems in election administration. *Policy Studies Journal*, 34(4), 491–510.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government*

- Information Quarterly*, 27(3), 264–271.
- Deegan, C., Rankin, M., & Voght, P. (2000). Firms' Disclosure Reactions to Major Social Incidents: Australian Evidence. *Accounting Forum*, 24(1), 101–130. <https://doi.org/10.1111/1467-6303.00031>
- Gang, T. (1998). *Governmental Accounting and Auditing in China: Evolution and Current Reforms. Governmental Accounting and Auditing: International Comparisons*, Routledge. London, 122-48.
- Garcia, A. G. dan J. G. Garcia. 2010. Determinants of online reporting of accounting information by spanish local government authorities. *Local Government Studies* Vol. 36.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (IX)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121.
- Mulyana, B. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is e-government promoting convergence towards more accountable local governments? *International Public Management Journal*, 13(4), 350–380.
- Piotrowski, S. J., dan Bartelli, A. 2010. Measuring Municipal Transparency. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April.
- Rahman, A., Sutaryo, & Budimanto, A. (2013). Determinan Internet Financial Reporting Di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*. <https://doi.org/10.17509/jaset.v4i2.10095>
- Scott, R.W. (1997). *Financial Accounting Theory*, Prentice Hall, New Jersey.
- Serrano-Cinca, C., Rueda-Tomás, M., & Portillo-Tarragona, P. (2009). Factors influencing e-disclosure in local public administrations. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 27(2), 355–378.
- Wahyuni, N. E., & Adam, H. (2012). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Perspektif Teori Institusional: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Malang. *Foreign Affairs*, 91(5), 1689–1699.
- Xiao, Jones, & Lymer. (2005). A Conceptual Framework for Investigating the Impact of the Internet on Corporate Financial Reporting. *The International Journal of Digital Accounting Research*, 5(September 2004), 131–169.